

**PERANAN PENDIDIKAN POLITIK dalam MATA
PELAJARAN PPKN TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI
POLITIK SISWA di MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2
CIANJUR**

Kevin Alexander Wijaya¹ Yahya Mulyadi² Ilham Fajar Suhendar³

wijayakevin04@gmail.com¹

yahyamulyadi@unsur.ac.id²

ilhamunsur@ac.id³

Universitas Suryakencana Cianjur

ABSTRAK

Pendidikan Politik dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi individu agar dia bisa memperoleh informasi lebih lengkap tentang politik. Pendidikan politik itu perlu diberikan kepada siswa sejak dini karena mereka yang akan menjadi generasi penerus dan yang akan memberikan suara di masa depan. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian melalui angket, wawancara, dan studi dokumentasi yang bersumber dari siswa dan guru sebagai responden. Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas 11 MIA, Guru PPKn dan pembina OSIS masing-masing satu orang, ketua OSIS, ketua kelas XI MIA berjumlah 5 orang, wali kelas XI MIA berjumlah 3 orang, dan perwakilan siswa dari tiap kelas masing-masing berjumlah satu orang. Sampel penelitian ini yaitu 25 orang dari tiap masing-masing kelas yang berjumlah 5 orang dari tiap kelasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik dalam mata pelajaran PPKn berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik siswa disekolah karena selalu diadakan pembinaan sikap positif dan pendampingan oleh wali kelas dan dalam pelaksanaan kegiatan politik serta guru PPKn dalam kegiatan pembelajaran memberikan materi tentang politik. Partisipasi Politik tidak hanya dipraktikan dilingkungan berbangsa dan negara saja, melainkan bisa dipraktikan di lingkungan sekolah. Karena dilingkungan sekolah siswa sudah diajarkan tentang demokrasi, karena demokrasi dan partisipasi politik itu tidak dapat dipisahkan.

Keywords: *Pendidikan Politik, Mata Pelajaran PPKn, Partisipasi Politik Siswa*

PENDAHULUAN

Pendidikan Politik dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi individu agar dia bisa memperoleh informasi lebih lengkap tentang politik. Pendidikan politik itu perlu diberikan kepada siswa sejak dini karena mereka yang akan menjadi generasi penerus dan yang akan memberikan suara di masa depan. Pada jenjang pendidikan sekolah menengah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diberikan kepada siswa yang bobotnya dua jam per minggu dan didalam mata pelajaran PPKn terdapat berbagai macam materi politik yang dapat diajarkan kepada siswa. Penulis mengambil judul penelitian ini karena Partisipasi politik dalam sebuah Negara demokrasi merupakan sesuatu yang utama. Salah satu alasan yang mendasar terkait hal tersebut adalah karena salah satu indikator kualitas demokrasi ditentukan oleh tinggi dan rendah serta bagaimana partisipasi politik tersebut dilakukan. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum dan menghadiri rapat umum.

Ada sebuah teori yaitu teori behaviorisme politik yang bunyinya bahwa teori ini menitikberatkan perhatian pada tindakan politik individu yang sejauh mana peranan pengetahuan politik sehingga terpengaruh pada perilaku politiknya (David Easton dalam Nasiwan, 2010:33). Menurut teori tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap individu itu memiliki tindakan politik yang berbeda-beda dan pengetahuan politik berpengaruh terhadap perilaku politiknya. . Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dimuat dalam skripsi oleh Chaerul (2014) mengemukakan bahwa pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi politik khususnya memberikan pengetahuan politik dan pemahaman politik memiliki pengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik siswa. Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran wajib yang diberikan di sekolah sebagai bagian dari kurikulum 2013.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Darmadi, 2013: 21).

Berdasarkan kutipan diatas, bisa disimpulkan bahwa mata pelajaran PPKn sebagai tempat untuk mengembangkan nilai luhur yang sudah ada sejak zaman dahulu dan membentuk moral yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia terutama yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan harus diaplikasikan didalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari PPKn di sekolah juga dapat menambah wawasan kebangsaan bagi siswa. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan diseluruh dunia, meskipun dengan berbagai istilah atau nama (Rahayu, 2013: 1). Mata pelajaran PPKn ternyata tidak hanya dipelajari di Indonesia saja melainkan diseluruh dunia pun dipelajari hanya saja berbeda nama atau istilah. Karena setiap warga negara wajib untuk mempelajari mata pelajaran PPKn karena di dalamnya terdapat materi yang mempelajari tentang kewarganegaraan. PPKn adalah salah satu mata pelajaran yang penting karena dengan mempelajari PPKn, kita bisa mengetahui bagaimana menjadi warga negara yang baik.

Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita bisa mengenal dan mengetahui banyak hal tentang negara kita seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan lain-lain melalui PPKn. Warga negara yang memahami dan menguasai kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan keterampilan (*civic skill*) akan menjadi warga negara yang memiliki kompetensi. Kemudian warga negara yang memahami dan menguasai tentang kewarganegaraan (*civic knowledge*) serta nilai-nilai kewarganegaraan (*civic value*) akan menjadi warga negara yang memiliki rasa percaya diri, sedangkan warga negara yang telah memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan serta nilai-nilai kewarganegaraan akan menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat.

Kemudian warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan, memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan serta memahami dan menguasai nilai-nilai kewarganegaraan akan menjadi seorang warga negara yang terampil, berpengetahuan dan berkepribadian. Dalam pembelajaran formal, sekolah juga memfasilitasi pendidikan politik melalui kurikulum. Walaupun tidak secara langsung disebutkan mata pelajaran pendidikan politik, tetapi muatan pendidikan politik tertuang dalam mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi alternatif pelaksanaan pendidikan politik di sekolah. Untuk terciptanya pelaksanaan pendidikan politik yang kondusif, maka peran sekolah sangatlah penting. Tetapi peran ini pun perlu didukung oleh peran serta dari semua elemen dan warga sekolah. Siswa mendapat pengetahuan dan pemahaman politik di sekolah melalui pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan. Memang dapat dikatakan bahwa semua mata pelajaran memiliki tujuan yang baik yaitu mendidik siswanya agar dapat menjadi warga negara sesuai harapan. Namun pada dasarnya mata pelajaran yang secara khusus mendidik siswa untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*) dibebankan kepada Pendidikan Kewarganegaraan karena materi yang termuat didalamnya banyak mengangkat tentang politik.

Selain menerapkan pendidikan politik dalam bentuk kurikulum, baik yang didesain khusus dalam PKn, maupun secara khusus dimana politik diberikan dalam mata pelajaran lain, bentuk kegiatan yang dapat difasilitasi oleh sekolah yang berhubungan dengan proses pendidikan politik diantaranya adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) maupun kegiatan ekstrakurikuler seperti paskibra, pramuka ataupun PMR. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat penting dalam meningkatkan kesadaran politik siswa, karena jika didasarkan pada tujuannya, PPKn atau dalam istilah lain lebih dikenal sebagai *civic education* mempunyai fungsi dan peran sebagai pendidikan politik. Dalam kurikulum PPKn terdapat beberapa materi politik yang nantinya dengan penyampaian materi politik tersebut diharapkan akan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai informasi politik.

LANDASAN TEORI

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya adalah peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin dan Winarno, 2013:6).

Dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan termasuk kedalam pendidikan politik yang dalamnya terdapat materi kewarganegaraan agar warga negara dan menjadi mampu berperan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai program pendidikan politik, dengan tugas untuk membina peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang melek politik, yaitu warga negara yang :

1. Sadar akan hukum dan UUD 1945, dalam memahami dengan baik tata keharusan bermasyarakat dan bernegara serta hak dan kewajiban dan tanggung jawab dalam pembangunan

2. Sadar akan pembangunan dalam arti membina dengan baik apa yang sudah, sedang dan dilaksanakan masyarakat dan negara serta bertanggung jawab dalam pembangunan
3. Sadar akan masalah yang sedang dan akan dihadapi dirinya, masyarakat, dan negaranya dalam melaksanakan hal-hal tersebut diatas. (Daryono, 2011:72)

Pendidikan politik dalam mata pelajaran PPKn bisa digunakan fungsinya untuk membina siswa agar menjadi warga negara yang melek politik. Selain melek politik, setelah mempelajari pendidikan politik siswa harus memiliki kesadaran terhadap upaya penegakan hukum sebagai ciri warga negara yang baik. Kemudian sebagai warga negara yang baik harus bisa bertanggung jawab dalam pembangunan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang sadar politik. (Kartono, 2009:64). Pendidikan politik menurut Kartono memiliki makna bahwa pendidikan politik merupakan suatu upaya kegiatan yang disengaja dan terstruktur untuk pembentukan individu yang sadar akan politik. Dalam pembentukan individu yang sadar politik perlunya kesadaran dalam diri seseorang dan adanya pengaruh dari luar yaitu perlunya peran guru ketika di sekolah dan tokoh politik dan masyarakat.

Pendidikan Politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. pendidikan macam ini tidak menonjolkan proses kultivasi individu menjadi “intelektual politik” yang bersinggasa dalam menara gading keilmuan atau menjadi pribadi kritis dan cerdas “yang terisolasi” dari masyarakat lingkungannya. (Kartono 2009:63). Dari penjelasan tersebut bahwa pendidikan politik adalah bagian dari pendidikan orang dewasa, pendidikan politik ini dibuat agar setiap individu mampu menjadi pribadi yang kritis dan mampu aktif dilingkungan masyarakatnya. Dari beberapa definisi mengenai pendidikan politik dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan kesadaran politik dengan cara berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan politik sebagai ciri warga negara yang baik dan taat hukum. Tujuan diadakannya Pendidikan Politik secara formal terdapat dalam Inpres No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa:

Tujuan Pendidikan Politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan

bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Berdasarkan kutipan diatas bisa disimpulkan bahwa pendidikan politik memiliki tujuan untuk memberikan pedoman kepada para generasi muda khususnya untuk memiliki perilaku dalam kehidupan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tujuan pendidikan politik ini dibuat dalam rangka untuk membangun manusia menjadi manusia yang seutuhnya yang dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Adapun beberapa tujuan pendidikan politik sebagai berikut:

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya)
 - a. Mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik
 - b. Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap
 - c. Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu/perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara
 - d. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan dan mengupayakan:
 - a. Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi-aktualisasi diri dari dimensi sosialnya)
 - b. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik).
 - c. Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara. (Kartono, 2009:68)

Dari beberapa point yang sudah disampaikan oleh Kartono dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik bertujuan untuk membuat rakyat bersikap tegas dalam memberikan kritik membangun, rakyat mampu memahami situasi sosial politik, dan mengupayakan agar rakyat mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik. Selain itu kartono (2009:70) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapat penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.
2. Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik

Menurut pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan politik dapat digunakan untuk mempersiapkan para kader-kader politik dalam rangka berpartisipasi dalam kegiatan politik khususnya ketika mereka mencalonkan diri menjadi anggota organisasi dan ketika setelah siswa tersebut ketika di masa depan sudah mencapai cita-citanya menjadi anggota organisasi atau menjadi salah satu kader politik maka dia juga akan mampu mencapai tujuan-tujuan politik yang diinginkan. Konsep pendidikan politik di tingkat sekolah itu sangat perlu diterapkan dan dimasukkan ke kurikulum pendidikan, agar menjadi bekal atau persiapan menghadapi kehidupan politik yang sesungguhnya. Kalau konsep pendidikan politik ini terlaksana niscaya generasi penerus bangsa ke depan akan menjadi pemimpin yang lebih idealis, lebih cerdas, lebih bertanggung jawab hingga *output* nantinya mereka tidak mengenal apa itu korupsi.

Pendidikan Politik memiliki tujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, sebagaimana juga bertujuan untuk membentuk kemampuan berpartisipasi politik pada individu, agar individu menjadi partisipasi Politik yang positif (Ruslan 2009:91). Dengan mempelajari pendidikan politik maka setiap individu terutama siswa sekolah akan memiliki kesadaran dalam berpolitik dan diharapkan mampu memiliki sifat yang positif dalam berpartisipasi politik. Sesuai dengan pengertian dari Pendidikan Politik, maka pendidikan politik memiliki dua fungsi utama yaitu pertama dalam merubah atau membentuk perilaku pribadi atau individu dan yang kedua lebih luas lagi yaitu membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat yang diinginkan sesuai dengan tujuan politik. mengemukakan bahwa pendidikan politik dapat memberikan sumbangan besar bagi :

1. Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya.
2. Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi, dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern (Kartono 1996:57)

Fungsi pendidikan politik diatas lebih menekankan fungsinya dalam merubah tatanan masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya yang ditandai dengan adanya perubahan sikap dari tiap individu-individu dalam masyarakat tersebut, yang lebih mendukung proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu sendiri ialah:

1. Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial dan kedurjanaan
2. Disamping mengenai kekuasaan memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat (Kartono 1996:59)

Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seorang individu dengan melalui pendidikan politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau ditunjukan dengan sikap dan perilaku politik yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik. Pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya (Kantaprawira 1988:54). Jadi sebelum masyarakat berpartisipasi didalam bidang politik, mereka harus dibekali terlebih dahulu oleh berbagai macam pengetahuan tentang politik agar ketika mereka terjun langsung untuk berpartisipasi mereka sudah melek politik. Apabila pendidikan politik dilaksanakan dilingkungan sekolah maka yang harus mempelajarinya adalah siswa. Pendidikan politik sebetulnya harus sudah diberikan sejak di sekolah terutama dijenjang SMP dan sederajat untuk mendapatkan ilmu dan bekal sehingga mereka akan matang dan pada akhirnya akan melek politik.

Guru PPKn sangat berpengaruh dalam pemberian materi tentang pendidikan politik di sekolah karena sudah dijelaskan bahwa didalam PPKn itu ada materi-materi pembelajaran berkaitan dengan ilmu politik. Maka dari itu guru harus mempersiapkan siswanya dengan matang agar kelak dimasa depan nanti ada siswa yang menjadi generasi penerus para kader atau elite politik. Dalam pendidikan politik di sekolah peran guru sangatlah penting, terlebih bagi seorang guru PPKn. Dimana seorang guru PPKn harus mampu mengajarkan kepada siswanya tentang pendidikan politik pada saat proses pembelajaran ataupun di luar

proses pembelajaran di sekolah tersebut. Misalnya pada proses pembelajaran seorang guru memberikan kesempatan untuk bertanya, mendiskusikan materi dan lain-lain. Karena mungkin saja para aktivis yang berada di setiap organisasi mulai aktif dalam bidang politik ketika mereka masih duduk di bangku persekolahan, bahkan di tiap sekolah ada berbagai macam organisasi-organisasi sebagai tempat diajarkannya pendidikan politik seperti OSIS, Paskibra, dan Palang Merah Remaja (PMR).

Siswa bisa menerapkan contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah sebagai ajang untuk melatih siswa supaya bisa melibatkan diri dalam demokrasi yang ada di Indonesia. Hal tersebut bisa diperbuat dari lingkup yang kecil contohnya sekolah. Siswa dapat menerapkan contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah sebagai ajang melatih diri agar bisa terlibat dalam demokrasi di Indonesia. Setelah itu, diharapkan agar dapat mengembangkan partisipasinya dalam lingkup yang lebih besar di masa yang akan datang. Seperti halnya para pejabat dan tokoh-tokoh politik di Indonesia, mereka semua mengawali semuanya dari sekolah. Partisipasi politik yaitu keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik (Rush dan Althoff dalam Gatara dan Said (2007:55. Berdasarkan kutipan tersebut partisipasi politik dapat dijelaskan bahwa adanya keterlibatan individu dalam setiap kegiatan politik bahkan individu bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik dalam berbagai macam tingkatan.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok yang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai politik. (Budiardjo 2008:367). Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan individu maupun kelompok, kegiatan dalam berpartisipasi bisa dilakukan dengan banyak cara di dalam kehidupan bermasyarakat. Antara lain memilih presiden dan wakil presiden lima tahun sekali. Dalam pemilihan Presiden untuk sekarang dilakukan secara langsung, artinya rakyat langsung memberikan hak suaranya dengan cara mencoblos dan tidak diwakilkan oleh anggota legislatif. Selain mengeluarkan hak suaranya, menghadiri rapat bisa disebut sebagai salah satu contoh partisipasi politik, rapat tersebut bisa dilakukan di dalam lingkungan masyarakat, sekolah maupun tempat kerja.

Bahkan rakyat bisa menjadi gladiator (pemain) dalam politik dengan cara menjadi anggota salah satu partai politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah

(Syafiie 2011:92). Dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik selain mengeluarkan hak suaranya, bisa juga dilakukan dengan terlibat dalam keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena Indonesia ini merupakan negara demokrasi maka kedaulatan berada penuh ditangan rakyat dan rakyat berhak menyampaikan aspirasi yang seluas-luasnya tanpa ada tekanan dari pihak lain sesuai dengan isi dari UUD 1945 Pasal 28 bahwa rakyat bebas untuk menyampaikan aspirasinya dalam berbagai macam bidang. Dari berbagai macam pendapat ahli tentang definisi partisipasi politik bisa ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam bidang politik dengan berbagai macam cara yaitu mengeluarkan hak suaranya ketika pemilu presiden dan pemilihan anggota legislatif (Pilkada), kemudian menghadiri rapat dan ikut mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai ciri dari negara demokrasi bahwa kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat.

Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut kedalam salah satu partai politik. Salah satu keaktifan siswa dalam kegiatan politik di sekolah ketika ada kebijakan yang bertolak belakang dengan siswa maka siswa tersebut berhak untuk memberikan kritik kepada pihak sekolah agar mampu memperbaiki kebijakan yang telah dikeluarkan sehingga tidak merugikan siswa dan memberikan saran atau solusi agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah itu mampu membuat siswa lebih nyaman. Atau bisa diadakan musyawarah antara OSIS dengan kepala sekolah untuk berdiskusi agar menemukan solusi yang terbaik terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. OSIS bisa menjadi penghubung antara siswa dengan pihak sekolah ketika ada permasalahan yang muncul, maka semua aspirasi yang dikeluarkan oleh siswa ditampung oleh OSIS kemudian disampaikan kepada pihak sekolah.

Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai dengan tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain mentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Partisipasi pasif siswa di sekolah yaitu ketika pihak sekolah atau OSIS membuat peraturan atau kebijakan maka siswa tersebut mengikuti dan mentaati kebijakan yang telah dibuat karena peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa.

Sedangkan menurut *Milbrath* dan *Goel* (Cholisin, 2007:152), membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Partisipasi politik spectator, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Partisipasi politik pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Partisipasi politik *Gladiator* adalah para komunikator, aktivis masyarakat/ aktivis fungsi partai politik, pekerja kampanye, dan sebagainya. Partisipasi politik *Spectator* adalah orang atau golongan yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan sistem politik negaranya, namun pernah mengikuti pemilihan umum meskipun keikutsertaannya hanya sekali. Partisipasi politik apatis merupakan partisipasi politik yang erat kaitannya dengan budaya politik apatis. Orang dalam kelompok partisipasi ini sama sekali menarik diri dan tidak peduli terhadap sistem politik yang ada. Partisipasi politik pengkritik jika duduk sebagai partai politik, bisa disebut sebagai oposisi. Pekerjaannya lebih banyak mengawasi jalannya pemerintah dan ikut serta mencari solusi dari permasalahan yang ada.

Siswa dapat menerapkan contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah sebagai ajang untuk melatih siswa agar bisa melibatkan diri dalam demokrasi yang ada di Indonesia. Bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi menjadi lima bentuk, yaitu kegiatan pemilihan, lobi, kegiatan organisasi, mencari koneksi, dan tindakan kekerasan (Huntington dan Nelson 1990:69)

Hal itu bisa dilakukan dari lingkup yang kecil seperti sekolah. Setelah itu, diharapkan siswa dapat mengembangkan partisipasinya dalam lingkup yang lebih besar di masa yang akan datang. Seperti halnya para pejabat dan tokoh –tokoh politik di Indonesia, mereka semua mengawali semuanya dari sekolah. Oleh karena itu, berikut contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah:

1. Mengikuti Kegiatan Keorganisasian di Sekolah
Organisasi kesiswaan yang dibentuk di sekolah biasanya ditujukan untuk mengatur dan menjalankan kegiatan diluar akademik siswa. Selain itu, organisasi kesiswaan juga biasanya dapat digunakan sebagai media berlatih siswa dalam berpartisipasi di bidang politik. Salah satu organisasi siswa yang ada di masyarakat adalah OSIS atau Organisasi Siswa Intra Sekolah. Dengan adanya organisasi ini, siswa seakan dipersatukan dalam

sebuah wadah yang menjembatani kegiatan kesiswaan. Dalam wadah tersebutlah siswa dapat berpartisipasi, dan meningkatkan interaksi antar siswa. Tidak hanya pengurus OSIS saja yang bisa berlatih untuk mengembangkan diri di bidang politik. Akan tetapi seluruh anggota OSIS atau semua siswa juga bisa ikut melatih diri. Selain OSIS, dalam sebuah sekolah biasanya juga ada organisasi perwakilan kelas. Organisasi ini adalah organisasi yang bersifat sebagai penyambung lidah siswa atau sebagai perwakilan setiap kelas untuk menyampaikan aspirasi – aspirasi dari anggota OSIS.

2. Mengikuti Pemilihan Ketua OSIS

Umumnya, pemilihan OSIS dilaksanakan dengan pemilihan langsung, tidak dipilih oleh guru. tidak hanya sesi pemilihan saja, akan tetapi calon ketua OSIS juga biasanya mengikuti serangkaian kegiatan seperti pada umumnya terdapat di pemilu. Serangkaian kegiatan tersebut antara lain pencalonan, kampanye, penyampaian visi dan misi, dan pemilihan langsung. Sistem ini sangat menjunjung tinggi nilai demokratisme. Oleh karena itu, semua siswa harus bisa ikut berpartisipasi. Partisipasi tersebut bisa berwujud pencalonan diri, panitia pemilihan suara, tim sukses, maupun pemilih.

3. Tidak Golput Dalam Pemilihan Pengurus Kelas

Tidak golput atau abstain dalam pemilihan pengurus kelas adalah salah satu contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah. Pemilihan pengurus kelas seperti ketua kelas, sekertaris, dan bendahara biasanya dilaksanakan melalui voting. Siswa diharapkan bisa menggunakan hak pilihnya agar keputusan mufakat bisa dicapai. Selain itu, siswa juga harus bisa menerima apabila hasil voting tersebut tidak sesuai dengan calon jagoan atau pilihan mereka. Siapapun yang menjabat sebagai pengurus kelas, siswa yang lain harus bisa dengan lapang dada melaksanakan dan menyepakati kebijakan dari pengurus kelas terpilih.

4. Aktif Berpartisipasi dalam Musyawarah atau Forum Diskusi di Lingkungan Sekolah

Forum diskusi atau musyawarah sering dilakukan di sekolah untuk menetapkan kebijakan, ataupun menyelesaikan suatu masalah. Baik itu antara guru dengan siswa, ataupun siswa dengan siswa. Dalam forum tersebut, partisipasi siswa sangatlah penting. Semakin banyak pendapat, akan semakin banyak pula penawar terhadap suatu masalah. Selain itu, keaktifan siswa dalam mengungkapkan aspirasinya akan menanamkan budaya politik demokratis yang akan terbawa di lingkup kehidupan yang

lain. Dalam forum diskusi atau musyawarah, siswa juga dilatih untuk bisa menyuarakan gagasan sendiri, dan menghormati bentuk-bentuk keputusan bersama. Dengan begitu, contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah bisa diterapkan.

5. Interaksi yang Demokratis antara Siswa, Guru, dan Wali Murid

Salah satu ciri kegiatan politik disekolah adalah demokratisme. oleh karena itu, interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun guru dengan wali murid, semuanya harus menyematkan paham demokratis. Dengan paham tersebut, semua pihak akan merasa bahwa semuanya memiliki kesempatan yang sama dalam berpendapat, dan dapat menghargai pendapat orang lain. Dari situlah interaksi akan terjalin dengan baik, terutama dalam proses belajar dan mengajar.

Dari berbagai macam bentuk partisipasi politik siswa di sekolah yang sudah disebutkan tidak terlepas dari peranan mata pelajaran PPKn. Di dalam mata pelajaran PPKn terdapat materi yang menjelaskan tentang demokrasi dan politik. Di dalam materi demokrasi dijelaskan bahwa rakyat berhak untuk melakukan semua aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakekatnya kedaulatan berada ditangan rakyat. Kemudian materi demokrasi dalam PPKn juga menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengeluarkan suara dan aspirasinya, apabila dikaitkan dengan kegiatan partisipasi politik siswa di sekolah maka siswa berhak untuk mengeluarkan suaranya ketika diadakannya pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS dan mencegah agar siswa tidak termasuk kedalam golongan yang apatis. Kemudian di dalam materi tentang politik di jelaskan bahwa warga negara yang baik itu harus berpartisipasi dalam kegiatan politik, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di sekolah dan disetiap sekolah pasti memiliki berbagai macam organisasi. Kegiatan keorganisasian di sekolah mampu untuk menampung partisipasi siswa dalam dunia politik dan sebagai tempat berlatih bagi siswa sebelum memasuki jenjang politik yang berada di lingkungan masyarakat dimasa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis, dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode deskriptif penelitian memungkinkan untuk melakukan hubungan antara variabel,

menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal (Sugiyono, 2008:1).

Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dari uraian diatas, maka penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti kata itu. Karena itulah dilakukan sebuah penelitian dan alasan penulis memilih metode ini karena sesuai dengan sifat dari masalah serta tujuan penelitian yang ingin diperoleh dalam menguji hipotesis, berusaha untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang Peranan Pendidikan Politik dalam Mata Pelajaran PPKn terhadap Tingkat Partisipasi Politik Siswa.

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut :

1. Studi dokumentasi, adalah pengumpulan data yang terkait dengan judul atau permasalahan seperti foto, dokumen, video, dll.
2. Angket, adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada siswa
3. Wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan pewawancara dengan terwawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono 2018:215). Populasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah seluruh siswa kelas XI yaitu siswa Kelas XI MIA 1 berjumlah 35 orang, siswa kelas XI MIA 2 berjumlah 36 orang, siswa kelas XI MIA 3 berjumlah 37 orang, siswa kelas XI MIA 4 berjumlah 37 orang, siswa kelas XI MIA 5 berjumlah 33 orang, guru PPKn berjumlah 1 orang, pembina OSIS berjumlah 1 orang, ketua OSIS berjumlah 1 orang, wali kelas 11 MIA berjumlah 5 orang. Jumlah keseluruhan Populasi sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam). Selain siswa, populasi penelitian adalah satu ketua OSIS, satu orang pembina OSIS, satu guru PPKn dan lima orang wali kelas 11 MIA. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto 2002: 109). Untuk sekedar acak-acakan maka apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika populasinya lebih dari 100 orang dapat diambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau lebih Arikunto (2002: 102). Dalam mengambil sampel dan populasi siswa di atas penelitian, peneliti

menetapkan sebanyak 13% dari 186 siswa yaitu 25 siswa secara random. Guru PPKn, Pembina OSIS, ketua OSIS, dan wali kelas 11 MIA yang diambil sampel semua populasi. Rincian pengambilan sampel siswa sebagai kelas XI MIA 1 berjumlah 35 orang diambil secara *random* sebanyak 5 orang siswa, kelas XI MIA 2 berjumlah 36 orang diambil secara *random* sebanyak 5 orang siswa, kelas XI MIA 3 berjumlah 37 orang diambil secara *random* sebanyak 5 orang siswa, kelas XI MIA 4 berjumlah 37 orang diambil secara *random* sebanyak 5 orang siswa, kelas XI MIA 5 berjumlah 33 orang diambil secara random sebanyak 5 orang siswa.

PEMBAHASAN

Data yang mendukung bahwa Pendidikan Politik dalam mata pelajaran PPKn berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik siswa di MAN 2 Cianjur yaitu sebagian besar (52%) dengan adanya pendampingan dalam partisipasi politik membuat siswa sangat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat dan sekolah, hampir setengahnya (32%) materi politik sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik siswa, sebagian besar (68%) siswa sangat berpartisipasi dalam pemilihan kepengurusan organisasi kesiswaan di sekolah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap siswa kelas 11 MIA di MAN 2 Cianjur, setelah peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen angket, wawancara dan studi dokumentasi, partisipasi politik siswa kelas 11 MIA sangat baik, salah satu contoh partisipasi politik yang dilakukan siswa di MAN 2 Cianjur yaitu dengan cara pemilihan ketua OSIS dan MPK. kegiatan partisipasi politik meliputi tindakan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum (Budiardjo, 2008:367). Dalam partisipasi politik, siswa kelas 11 MIA turut berperan serta memberikan suaranya. Pendampingan oleh wali kelas dalam kegiatan partisipasi politik ternyata sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik siswa. Buktinya, sebagian besar siswa menjadi berpartisipasi dalam kegiatan politik dikarenakan adanya pendampingan yang dilakukan oleh wali kelas. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu sudah menunjukkan suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana (Duverger 2005:127)

Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa siswa kelas 11 MIA di MAN 2 Cianjur memiliki partisipasi politik yang sangat baik karena siswa tersebut didampingi oleh wali kelas nya masing-masing dalam kegiatan partisipasi politik sehingga mampu terkontrol dengan baik. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti, ada cara yang bisa dilakukan melalui pembelajaran PPKn di kelas XI MIA. Caranya yaitu pemberian materi politik dalam pembelajaran oleh guru PPKn. Dalam PPKn terdapat materi yang muatannya berisi tentang politik. Materi politik bisa berpengaruh terhadap partisipasi politik karena ketika seorang siswa telah menguasai teori mengenai dunia politik secara otomatis para siswa akan mempunyai cara berfikir yang kritis mengenai situasi politik yang sedang terjadi di lingkungan nya. Kemudian dari cara penyampaian materi politik pun berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman siswa. Apabila guru tersebut menyampaikan materi dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, maka siswa tersebut akan lebih termotivasi untuk mempelajari tentang materi politik. Namun, jika sebaliknya maka siswa akan cenderung lebih bosan untuk mempelajari materi politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik yang dilakukan siswa di MAN 2 Cianjur yaitu siswa kelas 11 MIA berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS dan MPK yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali. Partisipasi politik yang dilakukan siswa MAN 2 Cianjur dilaksanakan dengan pendampingan oleh wali kelas.. Selain wali kelas, guru-guru di MAN 2 Cianjur juga selalu menanamkan sikap positif kepada siswa agar mereka mau berpartisipasi dalam kegiatan politik.
2. Upaya peningkatan partisipasi politik siswa melalui mata pelajaran PPKn yaitu dengan cara pemberian materi politik kepada siswa yang berfungsi agar siswa sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam segala kegiatan yang menyangkut tentang politik. Karena dalam mata pelajaran PPKn ada beberapa materi yang muatannya mempelajari tentang politik, salah satunya seperti materi tentang budaya politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Chaerul, Irlan. (2014). *Peranan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa Kelas X di MA AL-Muthmainnah*. Skripsi Sarjana Pendidikan pada FKIP Unsur Cianjur: Tidak diterbitkan
- Darmadi, Hamid. (2013). *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta
- Duverger, Maurice. (2005). *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Kartono, Kartini. (2009). *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju
- Nasiwan. (2010). *Teori-teori Politik Indonesia*. Yogyakarta: Omba
- Rahayu, Ani Sri. (2013). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)* Jakarta: PT Bumi Aksar
- Syafiee, Inu Kencana (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, strategi dan penilaian*. Jakarta: PT Bumi Aksara